



Consulting



PENERAPAN
TATA KELOLA
BANK PERKREDITAN RAKYAT

SETUP DAN DATA BPR



Nama BPR

PT. BPR PINANG ARTHA

Alamat

Jl. KH Hasyim Ashari Ruko Pinang Griya Permai No.10-11 Kel. Pinang Kec.
Pinang Kota Tangerang

◀ sisa 57 karakter

No Telpon

021 7310442

◀ sisa 4 karakter

Sandi BPR

601144

Posisi Laporan

31/12/2021

◀ sesuai format tanggal komputer

2021-12-31

Modal Inti Rp.

8.697.030.474

Jika aset < Rp10 miliar:

Total Aset Rp.

38.261.229.269

apakah telah diaudit oleh KAP?

Y

Bobot Faktor BPR

B

Status Audit

1

Diaudit oleh KAP

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI



Sisa karakter
pada kolom
Keterangan

No	Kriteria / Indikator	Skala	Keterangan	Sisa karakter pada kolom Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)				
1.	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Sudah sesuai dan Direktur Operasional yang membawahkan fungsiDirektur Kepatuhan sesuai Surat Persetujuan OJK	1891
2.	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Sudah sesuai, semua Direktur bertempat tinggal di provinsi yang sama	1932
3.	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Sudah sesuai, tidak ada Direksi yang merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank atau lembaga lain	1897
4.	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Sudah sesuai anggota Direksi tidak memiliki hubungan semenda dengan anggota Komisaris	1915
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	Sudah sesuai, tidak ada anggota Direksi yang menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan	1870
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Semua anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai surat OJK nomor.....	1911
Total nilai skala penerapan		6		
Rata-rata		1,00		
Bobot		50%		
Nilai struktur dan infrastruktur		0,50		
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)				
1	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Anggota Direksi sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa kepada siapapun	1877
2	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Direksi sudah melaksanakan tindak lanjut yang diperlukan sesuai dengan hasil audit, baik itu dari Otoritas Jasa Keuangan, dari hasil audit intern atau hasil audit KAP	1834
3	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Sudah dilaksanakan dengan baik	1970
4	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	3	Sudah dilaksanakan dengan baik	1970

5	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Semua anggota Direksi telah mematuhi aturan tersebut dengan baik	1936
6	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Sudah ada sistem terpadu untuk pengembangan skill atau keahlian pegawai melalui sistem pendidikan / pelatihan eksternal	1881
7	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Direksi sudah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk prinsip kehati-hatian	1919
8	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	1	Sudah ada pedoman dan tata tertib Direksi	1959
	Total nilai skala penerapan	14		
	Rata-rata	1,75		
	Bobot	40%		
	Nilai proses penerapan	0,70		
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)				
1	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Setiap tahun Direksi menjelaskan tentang apa yang telah dilakukan dan rencana kedepan didalam RUPS	1902
2	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	1	Direksi menginformasikan kebijakan yang telah diambil melalui Sosialisasi didalam grup Wa, Selebaran pada Majalah Dinding, Papan Informasi dan dalam rapat tertentu dengan karyawan	1821
3	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Sudah dilaksanakan dengan baik	1970
4	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	Direksi juga aktif melakukan / ikut pendidikan tambahan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan sesuai dengan ilmu yang hendak dipelajari oleh Direksi	1846
5	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Sudah sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan	1943
	Total nilai skala penerapan	7		
	Rata-rata	1,40		
	Bobot	10%		
	Nilai hasil penerapan	0,14		

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS



Sisa karakter
pada kolom
Keterangan

No	Kriteria / Indikator	Skala	Keterangan	Sisa karakter pada kolom Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)				
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Sudah sesuai aturan untuk BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 milyar	1929
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris BPR Pinang Artha adalah 2 orang dan jumlah anggota Direksi BPR Pinang Artha adalah 2 orang	1879
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	2	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan sesuai surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan	1895
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Salah satu orang anggota Dewan Komisaris berdomisili tinggal dikota yang sama dengan lokasi kantor Pusat BPR Pinang Artha	1878
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80 M paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M dan kurang dari Rp80 M , paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. *)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50 M diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2		1999
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	Sudah ada pedoman dan tata tertib untuk Dewan Komisaris	1945
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Tidak ada anggota Dewan Komisaris yang merangkap jabatan pada BPR atau BPRS lain baik itu untuk posisi Komisaris, Direksi atau PE	1871
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Tidak ada hubungan semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama Dewan Komisaris atau dengan Direksi	1896
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris adalah independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, hubungan keluarga dengan anggota Komisaris lain, Direksi dan atau PSP	1809
Total nilai skala penerapan		11		
Rata-rata		1,22		
Bobot		50%		
Nilai struktur dan infrastruktur		0,61		
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)				

1	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk	1	Dewan Komisaris telah melakukan tugas tersebut dengan baik	1942
2	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Dewan Komisaris telah melakukan tugas tersebut dengan baik	1942
3	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1	Sudah sesuai dan berjalan dengan baik	1963
4	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Sudah sesuai dan berjalan dengan baik	1963
5	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Sudah sesuai dan berjalan dengan baik	1963
6	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Sudah sesuai dan berjalan dengan baik	1963
7	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Sudah sesuai dan berjalan dengan baik	1963
8	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Sudah sesuai dan berjalan dengan baik	1963
	Total nilai skala penerapan	11		
	Rata-rata	1,38		
	Bobot	40%		
	Nilai proses penerapan	0,55		
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)				
1	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Semua rapat Dewan Komisaris sudah dinotuliskan dengan benar	1941
	Total nilai skala penerapan	1		
	Rata-rata	1,00		
	Bobot	10%		
	Nilai hasil penerapan	0,10		

KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE



Khusus BPR Modal Inti \geq Rp 80 milyar

No	Kriteria / Indikator	Skala	Keterangan	Sisa karakter pada kolom Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)				
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0		1999
	Total nilai skala penerapan	0		
	Rata-rata	-		
	Bobot	50%		
	Nilai struktur dan infrastruktur	-		
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)				
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0		1999
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0		1999
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0		1999
	Total nilai skala penerapan	0		
	Rata-rata	-		
	Bobot	40%		
	Nilai proses penerapan	-		
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)				
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0		1999
	Total nilai skala penerapan	0		
	Rata-rata	-		
	Bobot	10%		
	Nilai hasil penerapan	-		

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN



No	Kriteria / Indikator	Skala	Keterangan	Sisa karakter pada kolom Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)				
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	3	Belum ada kebijakan atau SOP soal Penyelesaian Benturan Kepentingan	1933
	Total nilai skala penerapan	3		
	Rata-rata	3,00		
	Bobot	50%		
	Nilai struktur dan infrastruktur	1,50		
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)				
1	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut	1	Belum pernah terjadi benturan kepentingan	1959
	Total nilai skala penerapan	1		
	Rata-rata	1,00		
	Bobot	40%		
	Nilai proses penerapan	0,40		
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)				
1	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Belum pernah terjadi jadi belum ada dokumentasi tentang benturan kepentingan	1924
	Total nilai skala penerapan	2		
	Rata-rata	2,00		
	Bobot	10%		
	Nilai hasil penerapan	0,20		

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN



No	Kriteria / Indikator	Skala	Keterangan	Sisa karakter pada kolom Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)				
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;</p> <p>b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan</p> <p>c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	2	Direktur Utama yang bertugas sebagai bagian operasional juga yang membawahkan fungsi kepatuhan. Direktur bertugas sebagai Direktur Bisnis	1863
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	3	Cukup paham tentang aturan Otoritas Jasa Keuangan	1951
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	3	Pejabat Eksekutif Kepatuhan sudah melakukan tugasnya secara independent	1929
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	Pedoman kerja sudah dilakukan pengkinian secara bertahap	1944
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	Sebagian ketentuan intern sudah ada	1965
Total nilai skala penerapan		12		
Rata-rata		2,40		
Bobot		50%		
Nilai struktur dan infrastruktur		1,20		
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)				
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Sudah dilakukan dengan baik	1973
2	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Sudah dilakukan dengan baik	1973

3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Sudah dilakukan dengan baik	1973
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	Sudah dilakukan dengan baik	1973
5	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	Sudah dilakukan dengan baik	1973
	Total nilai skala penerapan	8		
	Rata-rata	1,60		
	Bobot	40%		
	Nilai proses penerapan	0,64		
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)				
1	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	Pelanggaran	1989
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	3	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah menyampaikan laporan berkala kepada Dewan Komisaris	1901
3	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah dilakukan dengan baik	1973
	Total nilai skala penerapan	7		
	Rata-rata	2,33		
	Bobot	10%		
	Nilai hasil penerapan	0,23		

PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN



Sisa karakter
pada kolom
Keterangan

No	Kriteria / Indikator	Skala	Keterangan	Sisa karakter pada kolom Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)				
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	BPR Pinang Artha sudah memiliki struktur organisasi yang lengkap, termasuk Pejabat Eksekutif Audit Intern	1895
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	Sudah dilakukan dengan baik	1973
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	1	Pejabat Eksekutif Audit Intern sudah bekerja secara independent	1937
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	Pejabat Eksekutif Audit Intern bertanggung jawab terhadap Direktur Utama dan Dewan Komisaris	1908
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	Sudah dilakukan dengan baik	1973
Total nilai skala penerapan		8		
Rata-rata		1,60		
Bobot		50%		
Nilai struktur dan infrastruktur		0,80		
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)				
1	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	1	Sudah dilaksanakan dengan baik	1970
2	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. *)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50 M: diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2		2000
3	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Sudah dilaksanakan dengan baik	1970
4	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	Pegawai diberikan kebebasan untuk ikut Latihan sesuai kebutuhan masing-masing ilmu yang diperlukan	1902
Total nilai skala penerapan		7		
Rata-rata		1,75		
Bobot		40%		
Nilai proses penerapan		0,70		

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)				
1	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Sudah dilaksanakan sesuai prosedur yaitu dilaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris	1907
2	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Semua laporan yang perlu dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sudah dilaporkan sesuai jadwal yang ditentukan	1888
3	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. *)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50 M: diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2		2000
4	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Untuk pengatian Pejabat Eksekutif sudah dilaporkan untuk mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan	1892

PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN



Khusus bagi BPR yang memiliki aset \geq Rp10 milyar atau telah diaudit oleh KAP

No	Kriteria / Indikator	Skala	Keterangan	Sisa karakter pada kolom Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)				
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	Ada Perjanjian kerjasama dengan KAP, dan sudah mendapat persetujuan melalui RUPS dan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan	1876
	Total nilai skala penerapan	1		
	Rata-rata	1,00		
	Bobot	50%		
	Nilai struktur dan infrastruktur	0,50		
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)				
1	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	Sudah sesuai dengan aturan tersebut	1965
2	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR sudah melaporkan hasil audit KAP dan management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan	1912
	Total nilai skala penerapan	2		
	Rata-rata	1,00		
	Bobot	40%		
	Nilai proses penerapan	0,40		
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)				
1	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	Sudah sesuai dengan aturan tersebut	1965
2	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Sudah sesuai dengan aturan tersebut	1965
	Total nilai skala penerapan	3		
	Rata-rata	1,50		
	Bobot	10%		
	Nilai hasil penerapan	0,15		

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN



No	Kriteria / Indikator	Skala	Keterangan	Sisa karakter pada kolom Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)				
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80 M: BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M dan kurang dari Rp80 M: BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	2	Sudah ada Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko sesuai surat pengangkatan nomor..	1922
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	3	BPR Pinang Artha sudah memiliki kebijakan Manajemen Risiko dan prosedur Manajemen Risiko dalam bentuk Surat Keputusan Direktur, S.O.P	1867
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	3	Sudah memiliki kebijakan tertulis mengenai pengelolaan risiko tetapi belum sempurna	1915
Total nilai skala penerapan		8		
Rata-rata		2,67		
Bobot		50%		
Nilai struktur dan infrastruktur		1,34		
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)				
1	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	2	Sudah ada	1991
2	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Sudah dilakukan	1985
3	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	Sudah dilakukan	1985
4	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	Sudah memadai	1987
5	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	1948
6	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Sudah ada	1991
7	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	Sudah dilakukan disetiap lini dan unit kerja	1956

	Total nilai skala penerapan	14		
	Rata-rata	2,00		
	Bobot	40%		
	Nilai proses penerapan	0,80		
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)				
1	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Sudah dilakukan rutin setiap tahun sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan	1914
2	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan	1933
	Total nilai skala penerapan	2		
	Rata-rata	1,00		
	Bobot	10%		
	Nilai hasil penerapan	0,10		

BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT



Sisa karakter
pada kolom
Keterangan

No	Kriteria / Indikator	Skala	Keterangan	Sisa karakter pada kolom Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)				
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	Sudah ada ketentuan dari perusahaan untuk Batas Maksimum Pemberian Kredit	1927
	Total nilai skala penerapan	2		
	Rata-rata	2,00		
	Bobot	50%		
	Nilai struktur dan infrastruktur	1,00		
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)				
1	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2		2000
2	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	1	Proses pemberian kredit kepada pihak terkait sudah sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan	1898
	Total nilai skala penerapan	3		
	Rata-rata	1,50		
	Bobot	40%		
	Nilai proses penerapan	0,60		
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)				
1	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Belum ada laporan pelanggaran terhadap BMPK	1956
2	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Belum ada pelanggaran BMPK tahun 2021	1963
	Total nilai skala penerapan	3		
	Rata-rata	1,50		
	Bobot	10%		
	Nilai hasil penerapan	0,15		

RENCANA BISNIS



Sisa karakter
pada kolom
Keterangan

No	Kriteria / Indikator	Skala	Keterangan	Sisa karakter pada kolom Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)				
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Rencana Bisnis BPR tahun 2021 telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris	1909
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah sesuai dengan aturan dari Otoritas Jasa Keuangan	1946
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	RBB tahun 2012 telah mendapat persetujuan dari Para Pemegang saham melalui RUPS	1921
	Total nilai skala penerapan	5,00		
	Rata-rata	1,67		
	Bobot	50%		
	Nilai struktur dan infrastruktur	0,84		
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)				
1	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	RBB tahun 2021 sudah sesuai dengan ketentuan tersebut	1947
2	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Dewan Komisaris telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya melaksanakan pengawasan RBB tahun 2021	1902
	Total nilai skala penerapan	4,00		
	Rata-rata	2,00		
	Bobot	40%		
	Nilai proses penerapan	0,80		
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)				
1	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	RBB tahun 2021 sudah sesuai dengan ketentuan tersebut	1947
	Total nilai skala penerapan	1,00		
	Rata-rata	1,00		
	Bobot	10%		
	Nilai hasil penerapan	0,10		

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN



Sisa karakter
pada kolom
Keterangan

No	Kriteria / Indikator	Skala	Keterangan	Sisa karakter pada kolom Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)				
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Sudah tersedia	1986
	Total nilai skala penerapan	2,00		
	Rata-rata	2,00		
	Bobot	50%		
	Nilai struktur dan infrastruktur	1,00		
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)				
1	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan keuangan publikasi BPR setiap triwulan sudah BPR laporkan ke Otoritas Jasa Keuangan, melalui Majalah dinding dan web BPR	1872
2	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan keuangan tahunan BPR sudah BPR sudah publikasikan melalui web dan Koran Nasional	1912
3	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR sudah melaksanakan transparansi informasi produk, penggunaan data nasabah sesuai pedoman dan tata cara pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	1856
4	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR sudah menyusun laporan sesuai dengan aturan dari Otoritas Jasa Keuangan	1925
	Total nilai skala penerapan	7,00		
	Rata-rata	1,75		
	Bobot	40%		
	Nilai proses penerapan	0,70		
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)				
1	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Setiap laporan ditanda tangani oleh Direktur Utama	1950
2	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	Laporan Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah sudah ditangani dengan benar dan tepat waktu	1895
	Total nilai skala penerapan	4,00		
	Rata-rata	2,00		
	Bobot	10%		
	Nilai hasil penerapan	0,20		

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0,268	0,189	-	0,210	0,207	0,168	0,026	0,224	0,131	0,130	0,142	1,700
Peringkat Komposit	1						Predikat Komposit			Sangat Baik		

Kesimpulan

Uraian atas penilaian penerapan tata kelola dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian tata kelola secara komprehensif dan terstruktur, mencakup baik struktur dan infrastruktur tata kelola, proses penerapan tata kelola dan hasil penerapan tata kelola.

Dalam uraian ini paling sedikit menjelaskan kekuatan penerapan tata kelola dan identifikasi kelemahan berupa permasalahan dan penyebabnya, rencana tindak beserta target waktu pelaksanaannya.

BRP Pinang Artha sudah melaksanakan semua ketentuan yang mengatur tentang BPR dan Tata Kelola sebaik mungkin dan sebenar mungkin agar pelaksanaan Tata Kelola BPR dapat berjalan dengan baik dan selalu meningkat kualitasnya.

▲ Sisa 1778 karakter

TABEL BOBOT FAKTOR

No	Faktor Penilaian	Bobot A	Bobot B	Bobot C	Bobot D
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20,0	20,0	20,0	20,0
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	15,0	15,0	15,0	12,5
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	-	-	-	2,5
4	Penanganan benturan kepentingan	10,0	10,0	10,0	10,0
5	Penerapan fungsi kepatuhan	10,0	10,0	10,0	10,0
6	Penerapan fungsi audit intern	10,0	10,0	10,0	10,0
7	Penerapan fungsi audit ekstern	-	2,5	2,5	2,5
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	10,0	10,0	10,0	10,0
9	Batas maksimum pemberian kredit	7,5	7,5	7,5	7,5
10	Rencana bisnis	7,5	7,5	7,5	7,5
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan serta pelaporan intenal	10,0	7,5	7,5	7,5
	Total (harus 100.0)	100,0	100,0	100,0	100,0

No	Kriteria Penetapan Bobot	Bobot A	Bobot B	Bobot C	Bobot D
1	BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50 milyar, total aset kurang dari Rp10 milyar dan tidak diaudit oleh KAP	√			
2	BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50 milyar dan total aset paling sedikit Rp10 milyar		√		
3	BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50 milyar, total aset kurang dari Rp10 milyar namun telah diaudit oleh KAP		√		
4	BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50 milyar namun kurang dari Rp80 milyar			√	
5	BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80 milyar				√



Rekap Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

No	FAKTOR PENILAIAN	Penilaian (rata-rata)			Penilaian (dikalikan bobot)				Bobot BPR	Total Penilaian	KESIMPULAN PENILAIAN masing-masing faktor
		S	P	H	S(50)	P(40)	H(10)	Jumlah	B		
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	1,00	1,75	1,40	0,50	0,70	0,14	1,34	20,00%	0,268	
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	1,22	1,38	1,00	0,61	0,55	0,10	1,26	15,00%	0,189	
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	
4	Penanganan benturan kepentingan	3,00	1,00	2,00	1,50	0,40	0,20	2,10	10,00%	0,210	
5	Penerapan fungsi kepatuhan	2,40	1,60	2,33	1,20	0,64	0,23	2,07	10,00%	0,207	
6	Penerapan fungsi audit intern	1,60	1,75	1,75	0,80	0,70	0,18	1,68	10,00%	0,168	
7	Penerapan fungsi audit ekstern	1,00	1,00	1,50	0,50	0,40	0,15	1,05	2,50%	0,026	
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	2,67	2,00	1,00	1,34	0,80	0,10	2,24	10,00%	0,224	
9	Batas maksimum pemberian kredit	2,00	1,50	1,50	1,00	0,60	0,15	1,75	7,50%	0,131	
10	Rencana bisnis	1,67	2,00	1,00	0,84	0,80	0,10	1,74	7,50%	0,130	
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan serta pelaporan intenal	2,00	1,75	2,00	1,00	0,70	0,20	1,90	7,50%	0,142	
	Nilai Komposit							0		1,7	
	Peringkat Komposit									1	
	Predikat Komposit									Sangat Baik	

PENJELASAN UMUM PENERAPAN TATA KELOLA

Berisi penjelasan umum penerapan Tata Kelola BPR atau hal lain yang dinilai signifikan dan tidak termasuk dalam cakupan pada form lainnya

Penerapan Tata Kelola di BPR Pinang Artha sudah berjalan dengan baik, hanya perlu sedikit peningkatan untuk update dan perbaikan.



PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DIREKSI			
No	NIK	Nama Direksi	Jabatan
1	3174066906830005	Elmiko Sarirahmadhoni	0100
2	3174066906830005	Elmiko Sarirahmadhoni	0101
3	3276092805840001	Rachmat Hidayat	0200
4	0		0
5	0		0

Tugas dan Tanggung Jawab

Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis; Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; Menembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jajaran organisasi; Memastikan peningkatan kompetensi

Menyusun strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan; Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi; Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman int

Berupaya menumbuhkan bisnis pada sisi aktif (fokus pada baki debit kredit dan penempatan pada bank lain) paling tidak sama dengan rata-rata pertumbuhan kredit industri BPR; Menumbuhkan perolehan dana masyarakat dan lembaga keuangan lainnya untuk membiayai

perumbuhan aktiva tersebut; dan menyesuaikan tingkat pertumbuhan kredit sesuai dengan tingkat pertumbuhan dana; Menjaga tingkat kebutuhan modal minimum melalui perencanaan permodalan sesuai dengan ketentuan regulasi, kebutuhan internal bank sesuai risk

appetite dan rencana pertumbuhan bisnis kebutuhan penggunaan modal dan keperluan lainnya.

0100 = Direktur Utama
0101 = Direktur Utama yang menjalankan fungsi kepatuhan
0200 = Direktur
0201 = Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan

◀ sisa 1486 karakter
◀ sisa 1280 karakter
◀ sisa 1393 karakter
◀ sisa 1999 karakter
◀ sisa 1999 karakter

TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS	
Uraian tindak lanjut yang telah dilaksanakan	PENJELASAN LEBIH LANJUT, JIKA DIPERLUKAN
Direksi telah melaksanakan apa yang mengadi saran dan rekomendasi dari Dewan Komisaris.	

▲ Sisa 1912 karakter

▲ Sisa 1999 karakter

BAGIAN BERIKUT INI TIDAK DIISI, JIKA DIREKSI TIDAK MEMILIKI SAHAM DI BPR

Pada file.txt A0210 hanya melaporkan header saja

KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI PADA PT. BPR PINANG ARTHA					
No	NIK	Nama Direksi	Nominal	Persen	Penjelasan lebih lanjut atas kepemilikan saham pada BPR
1	3174066906830005	Elmiko Sarirahmadhoni	2.000.000.000	18,18	
2					
3					
4					
5					
Jumlah kepemilikan saham Anggota Direksi			2.000.000.000	18,18	
Total Modal Disetor BPR			11.000.000.000		

▲ Sisa 1999 karakter

BAGIAN BERIKUT INI TIDAK DIISI, JIKA DIREKSI TIDAK MEMILIKI SAHAM PADA PERUSAHAAN LAIN

Pada file.txt A0220 hanya melaporkan header saja

KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI PADA PERUSAHAAN LAIN				
No	NIK	Nama Direksi	Persen	Sandi Bank
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Penjelasan lebih lanjut atas kepemilikan saham pada perusahaan lain

▲ Sisa 1999 karakter

BAGIAN BERIKUT INI WAJIB DIISI

HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI PADA BPR		HUBUNGAN KEUANGAN			
No	NAMA DIREKSI	NIK	ANGGOTA DIREKSI LAIN	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	PEMEGANG SAHAM
1	Elmiko Sarirahmadhoni	3174066906830005	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Elmiko Sarirahmadhoni	3174066906830005	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Rachmat Hidayat	3276092805840001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4	0	0	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
5	0	0	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan lebih lanjut atas hubungan keuangan

▲ Disisi dengan format nama - hubungan keuangan dan dapat diisi lebih dari satu hubungan yang dipisahkan dgn tanda koma atau diisi "tidak ada"

▲ Sisa 1999 karakter

HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI PADA BPR		HUBUNGAN KELUARGA			
No	NAMA DIREKSI	NIK	ANGGOTA DIREKSI LAIN	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	PEMEGANG SAHAM
1	Elmiko Sarirahmadhoni	3174066906830005	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Elmiko Sarirahmadhoni	3174066906830005	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Rachmat Hidayat	3276092805840001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4	0	0	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
5	0	0	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan lebih lanjut atas hubungan keluarga

▲ Disisi dengan format nama - hubungan keluarga dan dapat diisi lebih dari satu hubungan yang dipisahkan dgn tanda koma atau diisi "tidak ada"

▲ Sisa 1999 karakter

DEWAN KOMISARIS



PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS				
No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	3275086107580020	Ismundarti	0100	1) Sebagai pusat komunikasi antara Dewan Komisaris dan Direksi, serta pemegang saham. 2) Memastikan bahwa Dewan Komisaris senantiasa diberi informasi mengenai hal-hal yang relevan dan dimintakan persetujuan yang diperlukan. 3) Bertanggung jawab memimpin Dewan Komisaris guna menjamin efektivitas fungsi Dewan Komisaris. 4) Bertanggung jawab untuk menentukan agenda rapat dan memimpin rapat. 5) Komisaris Utama menentukan keadaan mendesak dalam hal undangan rapat Dewan Komisaris dilakukan dalam waktu kurang dari 3 hari. 6) Mengundang anggota Dewan Komisaris untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris. 7) Memastikan agar para Komisaris mendapatkan informasi yang akurat, tepat waktu dan jelas. 8) Membina hubungan yang konstruktif antara Dewan Komisaris dan Direksi. 9) Mengembangkan standar Corporate Governance yang terbaik. ← sisa 1177 karakter
2	3173056001720001	Laksmi Indira K.	0200	1) Melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan memberikan nasihat, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategik, termasuk persetujuan terhadap penyediaan dana kepada pihak-pihak yang terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit bank. 2) Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. 3) Bersama-sama dengan Komisaris Utama mereview dan menyetujui rencana bisnis. 4) Bersama-sama dengan Komisaris Utama mereview dan menyetujui laporan tahunan. 5) Memberikan laporan dan mendapatkan persetujuan pemegang saham pada Laporan Pengawasan Dewan Komisaris. 6) Pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan. 7) Menghadiri semua rapat Dewan Komisaris dan rapat Komite terkait. 8) Menghadiri semua rapat Pemegang Saham. 9) Memberikan masukan strategi serta meninjau kinerja dan efektifitas manajemen pada rapat yang menyetujui sasaran dan tujuan serta memantau Laporan Kinerja. 10) Mengikuti pendidikan yang terkait dan berkelanjutan serta dimutakhirkan terhadap perubahan aturan dan ketentuan perundangan serta standar yang relevan. ← sisa 639 karakter
3				← sisa 2000 karakter
4				← sisa 2000 karakter
5				← sisa 2000 karakter

Jabatan
 0100 = Komisaris Utama
 0101 = Komisaris Utama Independen
 0200 = Komisaris
 0201 = Komisaris Independen

REKOMENDASI KEPADA DIREKSI	
Uraian Rekomendasi	PENJELASAN LEBIH LANJUT, JIKA DIPERLUKAN
Saran dan rekomendasi Dekom terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan yaitu untuk selalu menerapkan prinsip kehati-hatian terutama dalam pemberian kredit, mematuhi SOP, melaksanakan strategi pemasaran yang tepat dan menciptakan produk pinjaman sesuai kebutuhan masyarakat saat ini. Rekomendasi Dekom dapat dibaca pada bagian Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris pada bagian Topik/ Materi Pembahasan.	
▲ Sisa 1603 karakter	▲ Sisa 1999 karakter

BAGIAN BERIKUT INI TIDAK DIISI, JIKA DEWAN KOMISARIS TIDAK MEMILIKI SAHAM DI BPR

Pada file txt A0410 hanya melaporkan header saja

KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PT. BPR PINANG ARTHA					
No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal	Persen	Penjelasan lebih lanjut atas kepemilikan saham pada BPR
1	3275086107580020	Ismundarti	379.500.000	3,45	

2	3173056001720001	Laksmi Indira K.	424.500.000	3,86	
3				-	
4				-	
5				-	
Jumlah kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris			804.000.000	7,31	▲ Sisa 1999 karakter
Total Modal Disetor BPR			11.000.000.000		

BAGIAN BERIKUT INI TIDAK DIISI, JIKA DEWAN KOMISARIS TIDAK MEMILIKI SAHAM PADA PERUSAHAAN LAIN

Pada file txt A0420 hanya melaporkan header saja

KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN					
No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Persen	Sandi Bank	Nama Perusahaan
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
					Penjelasan lebih lanjut atas kepemilikan saham pada perusahaan lain
					Anggota Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki saham pada perusahaan lain.
					▲ Sisa 1925 karakter

BAGIAN BERIKUT INI WAJIB DIISI

HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR					HUBUNGAN KEUANGAN		
No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris			ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN	ANGGOTA DIREKSI	PEMEGANG SAHAM
1	3275086107580020	Ismundarti			Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	3173056001720001	Laksmi Indira K.			Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	0	0			Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4	0	0			Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
5	0	0			Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan lebih lanjut atas hubungan keuangan					▲ Diisi dengan format nama - hubungan keuangan dan dapat diisi lebih dari satu hubungan yang dipisahkan dgn tanda koma atau diisi "tidak ada"		
Tidak ada hubungan keuangan antaranggota Dewan Komisaris maupun dengan anggota Direksi dan Pemegang Saham lainnya							
					▲ Sisa 1886 karakter		

HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR					HUBUNGAN KELUARGA		
No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris			ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN	ANGGOTA DIREKSI	PEMEGANG SAHAM
1	3275086107580020	Ismundarti			Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	3173056001720001	Laksmi Indira K.			Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	0	0			Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4	0	0			Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
5	0	0			Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan lebih lanjut atas hubungan keluarga					▲ Diisi dengan format nama - hubungan keluarga dan dapat diisi lebih dari satu hubungan yang dipisahkan dgn tanda koma atau diisi "tidak ada"		

Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga antar anggota Dewan Komisaris, demikian juga dengan Direksi dan Pemegang Saham.

▲ Sisa 1874 karakter

PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS			Jika jumlah rapat kurang dari 10x, maka pada file TXT A0810, hapus baris D01 yang tidak terpakai	
No	Tanggal Rapat		Jumlah Peserta	Topik / Materi Pembahasan
	Sesuai Format Tanggal Komputer	YYYYMMDD		
1	25/01/2021	20210125	2	1) Diharapkan memperbesar porsi kredit /pembiayaan UMKM. 2) Pelayanan yang mudah,cepat dengan prinsip kehati-hatian untuk meningkatkan KYD. 3) Meningkatkan literasi, edukasi kepada masyarakat sekitar. 4) Melakukan restrukturisasi kredit masa Pandemi (POJK 8/POJK.03/2020).
2	26/03/2021	20210326	2	1) Meningkatkan pengawasan/ pantauan terhadap debitur dalam kategori KL dan Diragukan, adakan pendekatan untuk mencari solusi. 2) Menindaklanjuti temuan SPI dan OJK. 3) Segera adakan lelang dan jual agunan bagi kredit macet. 4) Membuat laporan tepat waktu. Mempersiapkan RUPS tahun buku 2020.
3	21/05/2021	20210521	2	1) Supaya berhati-hati dalam pemberian kredit besar. 2) Untuk membuat produk baru, tabungan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini/ saat pandemi untuk meningkatkan DPK. 3) Memantau perkembangan kredit baru dan melakukan mitigasi resiko. 4) Diperlukan <i>cross checking</i> oleh team kredit atas kredit baru. 5) <i>Monitoring</i> penagihan dengan
4	18/06/2021	20210618	2	1) Optimalisasi peningkatan kualitas kredit untuk menurunkan KAP. 2) Siapkan mekanisme peningkatan KYD, perkuat team kredit. 3) Segera ambil tindakan yang diperlukan jika terlihat indikasi kecurangan pada team kredit untuk meminimalkan kemungkinan Fraud.4) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi SDM. 5) Melaksanakan seluruh prosedur kesehatan dalam masa pandemi bagi seluruh karyawan dan kebersihan bagi gedung kantor.
5	24/09/2021	20210924	2	1) Tingkatkan penagihan Hapus Buku untuk mendapatkan pendapatan. 2) Tingkatkan kerja sama dengan BPR lain untuk menggarap UMKM. 3) Menerapkan sepenuhnya ketentuan POJK No.12/POJK.01/2017 terkait APU-PPT & lakukan pelaporan rutin. 4) Mempersiapkan seluruh PE untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. 5) Melakukan pelaporan mekanisme <i>Self-Assessment</i> untuk Tata Kelola dan Manajemen Risiko. 6) Perlu adanya evaluasi berkala untuk temuan AI, misal tiap semester. 7) Lakukan pengkinian data dan pembakuan SOP secara berkala.
6	16/11/2021	20211116	2	1) Adakan evaluasi terhadap produk baru yang telah diluncurkan sehingga terukur efektivitas produk tersebut. 2) Lakukan kegiatan penagihan yang efektif dan efisien serta lakukan pemilahan skala prioritas bagi kredit bermasalah sehingga tidak membebani BOPO. 3) Memasukkan tambahan anggaran dalam penyusunan RBB tahun 2022 a.l untuk pos-pos sbb.: pembelian anti virus berlisensi untuk perlindungan <i>Server</i> dan <i>PC</i> , <i>Up Grade</i> kapasitas <i>Hardisk</i> untuk menambah besar daya tampung data. 4) Perlu dilakukan <i>Stress Test</i> untuk menguji ketahanan dalam permodalan BPR terhadap program restrukturisasi dari pemerintah
7				
8				
9				
10				
11				
12				
Jumlah Rapat		6		

Penjelasan lebih lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

Keseluruhan pelaksanaan Rapat dilaksanakan dengan tatap muka langsung dan bertempat di Kantor Pusat BPR Pinang Artha.

▲ Sisa 1883 karakter

KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DALAM RAPAT					
No	NIK	NAMA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	Kehadiran		
			Fisik	Tele	Persen
1	3275086107580020	Ismundarti	6		100,00
2	3173056001720001	Laksmi Indira K.	6		100,00
3	-	-	-		-
4	-	-	-		-
5	-	-	-		-
Jumlah Rapat			6		

Penjelasan lebih lanjut kehadiran rapat

Anggota Dewan Komisaris hanya terdiri dari 2 orang yaitu Komisaris Utama dan Komisaris sehingga rapat selalu dilaksanakan d

▲ Sisa 1847 karakter

02 = Anggota komite

▲ Sisa 2000 karakter

BAGIAN BERIKUT INI TIDAK DIISI, JIKA BPR TIDAK MEMILIKI KOMITE

Pada file txt A0133 hanya melaporkan header saja

PROGRAM KERJA KOMITE				
NO	KOMITE	PROGRAM KERJA	REALISASI PROGRAM KERJA	JUMLAH RAPAT
02	Komite Pemantau Risiko			
		▲ Sisa 2000 karakter	▲ Sisa 2000 karakter	
01	Komite Audit			
		▲ Sisa 2000 karakter	▲ Sisa 2000 karakter	
02	Komite Pemantau Risiko			
		▲ Sisa 2000 karakter	▲ Sisa 2000 karakter	
02	Komite Pemantau Risiko			
		▲ Sisa 2000 karakter	▲ Sisa 2000 karakter	
03	Komite Remunerasi dan Nominasi			
		▲ Sisa 2000 karakter	▲ Sisa 2000 karakter	

Tindak Lanjut Rekomendasi Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

Uraian tindak lanjut

▲ Sisa 2000 karakter

PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI & FASILITAS LAIN

PAKET REMUNERASI

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji Pokok	2	32.000.000	2	19.746.000
2	Tunjangan-tunjangan	2	13.620.000	2	5.822.000
3	Tantiem				
4	Kompensasi berbasis saham				
5	Remunerasi lainnya				
Total			45.620.000		25.568.000

Penjelasan Lebih Lanjut Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

Uraian kebijakan RUPS

Akta nomor 15 tanggal 17 Desember 2020 tentang Tunjangan Jabatan, THR, DPLK, BP Jamsostek, BPJS Kesehatan untuk Direksi dan Dewan Komisaris

▲ Sisa 1861 karakter

FASILITAS LAIN YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	DIREKSI
1	Perumahan	Tidak ada fasilitas perumahan dari kantor
2	Transportasi	Ada fasilitas mobil dari kantor
3	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan
4	Fasilitas lainnya	Asuransi DPLK dari Manulife

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	DEWAN KOMISARIS
1	Perumahan	Tidak ada fasilitas perumahan dari kantor
2	Transportasi	Tidak ada fasilitas kendaraan dari kantor
3	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan
4	Fasilitas lainnya	Asuransi DPLK dari Manulife

Penjelasan Lebih Lanjut Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

Uraian penjelasan

Akta nomor 15 tanggal 17 Desember 2020 tentang fasilitas mobil dinas bagi Direksi dan fasilitas tunjangan transportasi bagi Dewan Komisaris

▲ Sisa 1861 karakter

RASIO GAJI

RASIO GAJI TERTINGGI TERHADAP GAJI TERENDAH

No	Keterangan	a/b	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,20	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,66	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,31	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,96	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2,70	1

Gaji yang dimaksud merupakan gaji keseluruhan yang diterima mencakup gaji pokok dan tunjangan dalam 1 (satu) tahun.

Penjelasan Lebih Lanjut Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Uraian penjelasan

Gaji tertinggi Direksi adalah untuk Direktur Utama karena menjabat sebagai Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan. Gaji tertinggi untuk pegawai adalah pegawai Pejabat Eksekutif dan gaji terendah untuk pegawai junior yang baru masuk

PENYIMPANGAN INTERNAL / FRAUD



No	PENYIMPANGAN INTERNAL	JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH							
		ANGGOTA DIREKSI		ANGGOTA DEWAN KOMISARIS		PEGAWAI TETAP		PEGAWAI TIDAK TETAP	
		Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
1	Total Fraud	-	-	-	-				
2	Telah Diselesaikan		-		-				
3	Dalam Proses Penyelesaian		-		-				
4	Belum Diupayakan Penyelesaiannya	-	-	-	-				
5	Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		-		-				

Penjelasan Lebih Lanjut Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Uraian penjelasan

▲ Sisa 1999 karakter

PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

No	URAIAN PERMASALAHAN	JUMLAH KASUS YANG DIHADAPI	
		Perdata	Pidana
1	Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	1
2	Dalam Proses Penyelesaian	3	-

Penjelasan Lebih Lanjut Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Uraian penjelasan

Untuk Pidana yang telah selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap adalah kasus penipuan kredit mobil bekas dengan terdakwa saudara Tony. Untuk Perdata dalam proses penyelesaian adalah 1. Kasus kepala Cabang Bogor, 2. Kasus debitur Budi Saputra yang kabur, 3. Kasus fraud karyawan Cabang Bogor atas nama Lola

▲ Sisa 1691 karakter

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK



No	Tanggal Pelaksanaan		Jenis Kegiatan Sosial/Politik	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
	Format tanggal komputer	YYYYMMDD				
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						